

**PENGARUH INFLASI, PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

TAHUN 2009-2017

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

**Uswatun Hasanah
NPM. 1551010312**

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Ahmad Habibi, S.E., M.E

Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan suatu daerah. Strategi pembangunan dan sasaran tujuan daerah harus benar-benar memperhatikan aspek sumberdaya manusia dalam memasuki lapangan kerja. Salah satu upaya dalam penciptaan perluasan lapangan kerja dan penciptaan lapangan-lapangan kerja yang berkelanjutan adalah adanya pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat maka angka pengangguran akan berkurang. Dalam hal ini semakin berkembangnya potensi yang sangat mendukung dengan potensi lokasi geografis maka dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja.

Rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dan pandangan Ekonomi Islam terhadap inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder di Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara parsial bahwa variabel inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel PDRB serta variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel inflasi, PDRB dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dengan kata lain variabel-variabel independen mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel penyerapan tenaga kerja.

Perspektif Ekonomi Islam mengenai inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena didasarkan untuk kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci : Penyerapan tenaga kerja, Inflasi, PDRB, Upah Minimum



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah
NPM : 1551010312
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 18 Juni 2019
Penulis,

Uswatun Hasanah
NPM. 1551010312



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH INFLASI, PDRB DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA
BANDAR LAMPUNG, DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM TAHUN 2009 - 2017**

Nama : Uswatun Hasanah
NPM : 1551010312
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003

Femei Purnamasari, S.E., M.Si
NIP. 198405212015032004

Ketua Jurusan,

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH INFLASI, PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2017”** disusun oleh **Uswatun Hasanah, NPM : 1551010312, Jurusan Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 27 Agustus 2019**

TIM PENGUJI

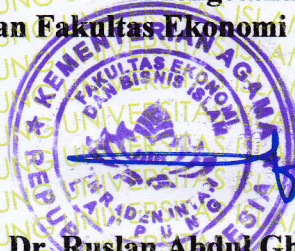
Ketua : Budimansyah, M.Kom.I (.....)

Sekretaris : M. Iqbal Fasa, S.E.I., M.E.I (.....)

Penguji I : M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy (.....)

Penguji II : Ahmad Habibi, S.E., M.E (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

(Q.S At-taubah : 105)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur penulis kepada Allah swt, skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak M. Azis dan Ibu Binti Khoiriyah atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan serta motivasi kalian yang selalu memberikan semangat dan menguatkan disetiap menuntut ilmu.
2. Kedua adikku Ubaidillah Humam dan Azzam Muzakki yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik dalam menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, berkarya dan berkualitas dalam mendidik putra-putri Indonesia.
4. Bapak/ibu dosen yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama oleh kedua orang tua yaitu Uswatun Hasanah. Dilahirkan di Desa Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Pada tanggal 21 Desember 1996 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan bapak M. Azis dan ibu Binti Khoiriyah.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Taman kanak-kanak ditempuh di TK Islam Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2003.
2. Pendidikan sekolah dasar ditempuh di MIN 2 Pringsewu, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2009.
3. Melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2013 melanjutkan ke sekolah menengah atas di MAN 1 Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.
5. Kemudian pada tahun 2015 meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Prodi Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 18 Juni 2019
Penulis,

Uswatun Hasanah
NPM. 1551010312

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur selalu terucap atas segala nikmat yang diberikan Allah swt kepada kita, yaitu berupa nikmat Iman, Islam dan Ihsan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017”. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta wakil Dekan 1, 2 dan 3.
2. Madnasir, S.E., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta staf-stafnya.
3. Ahmad Habibi, S.E., M.E., dan Femei Purnamasari, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga ilmu yang diberikan selama ini menjadi barokah dan bermanfaat.
4. Bapak Ibu Dosen serta Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Karyawan Perpustakaan BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam serta Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

6. Pakpoh Haryono, Bude Nur Husnah, Pakde Agusman, Bude Poniah Ps serta kakak sepupuku Rahmatun Nisa, Najib Darmawan dan adikku M. Budi Prayugo dan M. Radityo Wicaksono yang selalu memberikan doa, bantuan dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
7. Kawan seperjuangan kelas Ekonomi Islam G 2015 yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan, UTS, UAS hingga proses skripsi serta sahabatku Akrim Mufadiyah, Nuris Nawati, Amrina Tuti Rosyidah, Ayu Septiani, Sulton Malik Al-ghozali, Erwin Saifulloh, Af'idatul Adzkiyah Mashodi, Renny Fildzah Sari Zullini dan Aprilia Imanuri yang selalu menemani, mendukung dan memberikan semangat selama proses mengerjakan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian akan menjadi amal ibadah, sehingga diridhoi Allah swt serta mudah-mudahan Allah swt akan membalasnya. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Bandar Lampung, 18 Juni 2019

Penulis,

Uswatun Hasanah
NPM. 1551010312

DAFTAR ISI

JUDUL

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Tenaga Kerja	14
1. Definisi Tenaga Kerja	14
2. Penduduk	15
B. Konsep Penyerapan Tenaga Kerja	19
1. Penyerapan Tenaga Kerja	19
2. Permintaan Tenaga Kerja	21
3. Penawaran Tenaga Kerja	25

C. Konsep Inflasi	27
1. Definisi Inflasi.....	27
2. Menentukan Tingkat Inflasi	29
3. Dampak Inflasi	31
4. Hubungan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	33
D. Konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).....	35
1. Definisi PDRB	35
2. Metode Perhitungan PDRB.....	37
3. Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	39
E. Konsep Upah Minimum	40
1. Penggolongan dan Jenis-jenis Upah	40
2. Definisi Upah Minimum	41
3. Penetapan Upah Minimum	45
4. Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	47
F. Konsep Ekonomi Islam	50
1. Pengertian Ekonomi Islam	50
2. Nilai-nilai Ekonomi Islam	52
3. Tenaga Kerja dalam Pandangan Ekonomi Islam	55
4. Inflasi dalam Pandangan Ekonomi Islam	58
5. PDRB dalam Pandangan Ekonomi Islam.....	61
6. Upah Minimum dalam Pandangan Ekonomi Islam	64
G. Penelitian Terdahulu	66
H. Kerangka Pemikiran	71
I. Hipotesis	73
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	75
B. Jenis dan Sumber Data	76
C. Teknik Pengumpulan Data	76
D. Populasi dan Sample	77
E. Definisi Operasional Variabel	78
F. Alat Analisis Data	79

G. Metode Analisis Data	80
-------------------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	86
1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	86
2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	87
B. Hasil Penelitian	89
1. Analisis Data	89
2. Pembahasan.....	102

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Kondisi Umum Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung

Tabel 1.2 : Kondisi Umum Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung

Tabel 4.1 : Daftar Walikota Bandar Lampung beserta Periode Jabatan

Tabel 4.2 : Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.3 : Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4 : Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.5 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7 : Hasil Uji Signifikansi Parsial

Tabel 4.8 : Hasil Uji Signifikansi Simultan

Tabel 4.9 : Hasil Uji Koefisien Determinasi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Komposisi Penduduk

Gambar 2.2 : Kerangka Berfikir



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Pembimbing
- Lampiran II : Blanko Konsultasi
- Lampiran III : Data Sebelum Diolah
- Lampiran IV : Output Regresi Berganda
- Lampiran V : Tabel T Pada Tingkat Kepercayaan 95% ($\alpha = 0.05$)
- Lampiran VI : Tabel F Pada Tingkat Kepercayaan 95% ($\alpha = 0.05$)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini. Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENGARUH INFLASI, PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2017”**.

Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama.¹

2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.²

¹ Tajul Khawalaty, *Inflasi dan Solusinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2000), h.6

² Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), h.26

3. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja diperusahaannya.³

4. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi.⁴

5. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan berproduksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun kelompok atau negara sesuai ajaran islam) atau berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.⁵

Berdasarkan penjelasan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk membahas lebih dalam mengenai Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.71

⁴ Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, "Pengaruh Investasi Dan Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Kendari", E-ISSN : 2503-1937, *Jurnal Ekonomi*, Vol.1. No. 1, April 2016, h.14.

⁵ Hasan Andy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), h.11

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah:

1. Alasan Objektif

Pada tahun 2008 dimana terjadi krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih di tahun 2009 tersebut. Sehingga harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Lampung bertahan tinggi yang dapat memicu tingginya inflasi di Kota Bandar Lampung dan adanya fenomena tentang permasalahan yang muncul dalam kebijakan penetapan upah minimum kota (UMK). Akan tetapi menjadi rekor tertinggi yang diperoleh dalam pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan PDRB Provinsi Lampung. Semakin terkendalinya beberapa faktor tersebut di harapkan berdampak pada terserapnya tenaga kerja di kota Bandar Lampung, sehingga mengurangi angka pengangguran. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 hingga tahun 2017.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu program studi Ekonomi Syariah. Peneliti melakukan penelitian ini karena banyaknya referensi pendukung dari data BPS atau dari literature lainnya.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mewujudkan adanya perubahan-perubahan ekonomi, disamping itu sudah tentu terjadi kenaikan output.⁶ Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu.⁷ Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari seberapa jauh pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang tinggi maka akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dalam usia kerja, sehingga kesejahteraan masyarakat dalam usia kerja akan meningkat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi diperlukan kerja keras dan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Hal tersebut membutuhkan kerja sama dengan semua pihak baik swasta, pemerintah, maupun masyarakat dalam usia kerja yang mempunyai status sebagai pekerja atau bekerja.

Simanjuntak menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, dengan batasan umur 15 tahun (usia kerja) dan merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja disuatu daerah tertentu.⁸ Salah satu faktor yang

⁶ Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.24

⁷ Irawan, Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), h. 9

⁸ J. Simanjuntak Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: FE UI, 1985), h. 8

mempengaruhi keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan itu sendiri, yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Provinsi Lampung pada umumnya. Berikut ini adalah daftar penyerapan tenaga kerja perkabupaten atau kota di Provinsi Lampung tahun 2009-2017.

Tabel 1.1
Kondisi Umum Tenaga Kerja
Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017

Kota / Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Lampung Barat	213236	245405	197537	245884	14133	13799	12056	12056	19811	973917
Tanggamus	339687	267337	248649	264478	36616	38938	46448	46448	50895	1339496
Lampung Selatan	419673	436955	410925	379497	102577	112224	107250	107250	127648	2203999
Lampung Timur	448736	476179	451664	453264	27301	32560	42311	42311	54211	2028537
Lampung Tengah	546876	631320	552750	588296	59549	65154	84229	84229	89107	2701510
Lampung Utara	232717	271763	261350	242358	43332	48828	54423	54423	59088	1268282
Way Kanan	165339	200384	188982	189101	7127	7862	13497	13497	14431	800220
Tulang Bawang	354402	198165	181514	175076	18269	22658	20445	20445	31077	1022051
Pesawaran	176123	182685	185143	163393	12087	13270	16579	16579	21847	787706
Pringsewu	0	168886	165624	152606	54189	53699	62837	62837	66231	786909
Mesuji	0	95105	87895	82033	1775	1451	4723	4723	5776	283481
Tulang Bawang Barat	0	125929	117459	120739	10115	11553	13982	13982	17609	431368
Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0	5549	5549	8684	19782
Bandar Lampung	374261	374664	370995	330999	350233	381304	405605	405605	436756	3430422
Metro	57498	62301	61844	61583	64491	65747	67289	67289	72351	580393

Sumber : Badan Pusat Statistik Di Provinsi Lampung (data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan data mengenai kondisi umum jumlah tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Lampung menurut kota/kabupaten tahun 2009-2017. Jumlah penduduk yang bekerja terbanyak di Provinsi Lampung menurut kota/kabupaten tahun 2009-2017 yaitu di Kota Bandar Lampung sebesar 3.430.422 orang. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 19.782 orang. Dikarenakan Provinsi Lampung mengalami pemerataan yang mengakibatkan timbulnya

kabupaten baru pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Pesisir Barat yang pecahan dari Kabupaten Lampung Barat.

Secara spasial, Lampung merupakan Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi keempat di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Capaian kinerja ekonomi Lampung di akhir tersebut menjadi layak untuk terus diupayakan agar struktur dan sumber pertumbuhan ekonomi Lampung semakin seimbang dan mampu menopang pertumbuhan secara berkesinambungan.

Hal ini terlihat dari banyaknya tenaga kerja di daerah perkotaan maupun pedesaan yang bekerja dibawah jam kerja normal dan mereka hanya bekerja secara harian, mingguan, atau musiman. Keadaan ini menuntut penciptaan lapangan kerja baru sesuai dengan perkembangan jumlah tenaga kerja.⁹ Dengan begitu terjadi adanya ketidakseimbangan antara naiknya penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Bandar Lampung. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya.

Pada Kota Bandar Lampung ada beberapa potensi yang sangat mendukung salah satunya yaitu pada potensi lokasi geografis yang sangat strategis dan ternyata masih memiliki jumlah penduduk yang terlalu besar dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten lainnya. Pada posisi geografis tersebut mengantar Kota Bandar Lampung untuk meraih peluang menjadi

⁹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2015), h.9

salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi regional IMS-GT maupun menjadi bagian dari koridor kegiatan ekonomi. Pada konstelasi ruang perekonomian tersebut, Kota Bandar Lampung berpeluang mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada. Sehingga segala ketentuan tentang tenaga kerja sudah harus segera dilakukan penyesuaian dan pengembangan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.2
Kondisi Umum Tenaga Kerja
Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Pertumbuhan (%)	Penduduk Yang Bekerja (orang)	Pertumbuhan (%)
2009	645699		374261	
2010	676954	4.84%	374664	0.11%
2011	637530	-5.82%	370995	-0.98%
2012	643643	0.96%	330999	-10.78%
2013	669149	3.96%	350233	5.81%
2014	698310	4.36%	381304	8.87%
2015	717950	2.81%	405605	6.37%
2016	717950	0%	405605	0%
2017	749785	4.43%	436756	7.68%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (data diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan data mengenai kondisi umum tenaga kerja di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017. Kondisi pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dan pertumbuhan penduduk yang bekerja pada Kota Bandar Lampung pada tahun 2009-2017 mengalami perbandingan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 penduduk yang bekerja di Kota Bandar

Lampung mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0.11% dan dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 dan 2012 di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan pertumbuhan penduduk yang bekerja yang diduga disebabkan oleh naiknya harga BBM sehingga harga-harga faktor produksi ikut naik yang akhirnya juga berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja diduga dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat inflasi, bertambahnya jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) dan besar kecilnya pertumbuhan upah minimum Kota Bandar Lampung yang ditentukan. Begitupun sebaliknya bahwa berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja diduga dipengaruhi oleh turunnya produktifitas yang disebabkan tingkat inflasi yang tak terkendali, berkurangnya jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) dan terlalu banyaknya upah minimum kota yang ditentukan.

Kondisi seperti ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Karena jumlah penduduk dalam usia kerja adalah orang-orang yang termasuk sudah berkerja, siap bekerja namun belum mempunyai pekerjaan tetap, masih sekolah dan ibu rumah tangga. Kota Bandar Lampung yang memiliki potensi lokasi geografis yang sangat strategis untuk meraih peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi. Akan tetapi kurangnya peluang dalam lapangan pekerjaan yang tersedia mengakibatkan pengangguran di Kota Bandar Lampung tinggi.

Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan daerah. Pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan bekerja. Sedangkan tenaga kerja dalam ekonomi islam adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pemikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.¹⁰ Peran yang begitu penting menjadikan tenaga manusia tidak akan pernah tergantikan disemua kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tanpa tenaga kerja manusia tidak ada hasil yang akan dicapai dan tidak ada hasil yang berguna.

Islam pun mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah swt seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan sebagainya.¹¹ Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-taubah (9) Ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

¹⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.24

¹¹ Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h.50

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa dalam islam sangat menganjurkan untuk bekerja, karena dengan bekerja kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal dan setiap pekerjaan atau tingkah laku akan mendapatkan amal atau dosa, baik yang besar ataupun yang kecil pasti akan diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya pada hari kiamat serta akan mendapat pertanggung jawaban kelak diakhirat. Begitupun hadits Rasulullah saw banyak yang mengarahkan umat manusia agar bekerja dan mengarah kepada profesionalisme sesuai al-Qur'an.

Pada penyerapan tenaga kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, kepuasan kerja dan modal.¹² Karena inflasi yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang diantaranya adalah inflasi menyebabkan perubahan output dan tenaga kerja.

Perusahaan akan menambah jumlah output apabila masih terjadi inflasi ringan. Keinginan perusahaan menambah output tentu juga dibarengi penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dengan kondisi itu maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akan mendorong laju

¹² T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Edisi kedua, (Yogyakarta: BPFE, 1987), h. 52

perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional.¹³ Begitupun apabila terjadi peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja.¹⁴ Namun dengan kenaikan upah minimum tersebut akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang berkurang, karena dengan naiknya upah akan menambah biaya-biaya dalam perusahaan sehingga perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja sangatlah penting jika suatu wilayah tenaga kerja yang terserap rendah dan tidak tersedianya lapangan kerja maka akan meningkatnya pengangguran yang akan berakibat pada kemiskinan yang tinggi. Kondisi penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung yang tinggi dan pengangguran pun memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya pada periode tahun 2009-2017 menjadi ketertarikan tersendiri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, serta perlu juga diteliti sejauh mana peran inflasi, PDRB dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan dan menghindari kekeliruan peneliti maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti

¹³ Muana Nanga, *Makro Ekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h.44

¹⁴ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h.248

membatasi masalah ada variabel terikat yaitu Penyerapan Tenaga Kerja dimana tenaga kerja yang dimaksud adalah penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan atau sudah bekerja dalam usia kerja (diatas 15tahun). Sedangkan pada variabel bebas yaitu Tingkat Inflasi dalam pertahun, Jumlah PDRB dalam harga konstan dan Upah Minimum dalam Kota.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Adakah Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Parsial Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017?
2. Adakah Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017?
3. Bagaimana Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

- a. Untuk Mengetahui Seberapa Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Parsial Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017.

- b. Untuk Mengetahui Seberapa Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017.
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama hal praktis dan teoritis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan Ilmu Ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sehingga memperoleh gelar sarjana ekonomi dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tenaga Kerja

1. Definisi Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan, yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Tenaga kerja sebagai sumber daya ekonomi menunjuk kepada kepemilikan pekerjaan tertentu, melakukan kegiatan bekerja, menempati lapangan kerja yang tersedia dan dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk orang lain.

Menurut Simanjuntak tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, dengan batasan umur 15 tahun (usia kerja) dan merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja disuatu daerah tertentu.¹⁶ Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Subri yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah permintaan partisipasi tenaga dalam memproduksi barang ataupun jasa

¹⁵ Oemar Hamalik, *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.7

¹⁶ J. Simanjuntak Payaman, *Pengantar Ekonomi...*, h. 8

terhadap penduduk berusia kerja (15 tahun keatas).¹⁷ Begitupun dengan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang ketenagakerjaan, ketentuan batas usia kerja penduduk Indonesia adalah 15 tahun.

Pada kamus besar bahasa Indonesia tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Menurut Artoyo pengertian tenaga kerja secara umum adalah pengertian tentang potensi yang terkandung dalam diri manusia yang di kaitkan dengan pendayagunaan di berbagai kegiatan usaha yang ada.¹⁸ Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam sebuah proses produksi. Tenaga kerja merupakan penggerak faktor produksi tersebut sehingga sampai dapat menghasilkan suatu barang dan jasa akhir.

2. Penduduk

Menurut Feriyanto bahwa penduduk adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut

¹⁷ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

¹⁸ Hendra Nairobi dan Muhidin Sirat, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan Makanan di Provinsi Lampung, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol.6 no.1, (2017), h.20

referensi waktu tertentu.¹⁹ Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Secara sederhana penduduk dikelompokkan menurut Penduduk Usia Kerja (PUK) dan Penduduk di Luar Usia kerja.

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja. Sedangkan Penduduk di Luar Usia Kerja adalah golongan penduduk usia kerja di bawah usia 15 tahun.

Adapun Penduduk dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Adapun angkatan kerja terdiri dari dua kelompok yaitu:

- 1) Bekerja adalah angkatan kerja yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Tercakup di dalamnya orang atau sekelompok orang yang meliputi:

¹⁹ Nur Feriyanto, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.27

- a) Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang tidak sedang bekerja atau cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin, belum masa produksi, dan sebagainya).
 - b) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian yang sementara tidak bekerja seperti dokter, tukang cukur, tukang pijit, dan sebagainya tetap dikategorikan tetap bekerja, walaupun selama seminggu sebelum pencacahan bekerja kurang dari satu jam.
- 2) Pengangguran adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja, seperti :
- a) Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan.
 - b) Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/ karyawan/ pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila sudah melakukan “tindakan nyata” seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

c) Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan adalah mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Mereka merasa karena situasi/ kondisi/ iklim/ musim tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

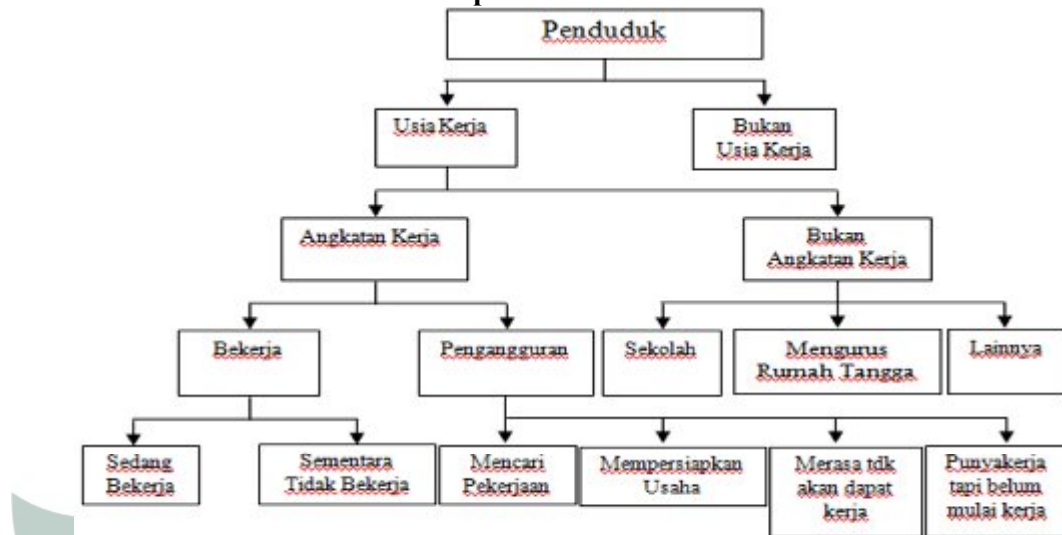
d) Sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/sudah mempersiapkan suatu usaha tetapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

b. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Bukan angkatan kerja terdiri dari tiga kelompok yaitu:

- 1) Sekolah adalah seseorang untuk bersekolah disekolah formal mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan, tidak termasuk yang sedang libur sekolah
- 2) Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga

- 3) Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain sekolah dan mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang sudah pensiun, orang yang cacat jasmani yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.²⁰

Gambar 2.1
Komposisi Penduduk



B. Konsep Penyerapan Tenaga Kerja

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Kuncoro, penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.²¹

²⁰ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.17

²¹ Haryo Kuncoro, "Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, (2002), h.46

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal yaitu yang pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor, dan yang kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional.

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara bersama sehingga dapat menentukan upah keseimbangan dan suatu keseimbangan tenaga kerja. Dalam dunia kerja penyerapan tenaga kerja berbeda-beda cara kerjanya, bisa dibedakan sesuai pendidikannya, keahlian khusus atau pengalaman untuk mendapatkan kerja disektor formal.²²

Menurut Handoko tentang teori tentang penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, kepuasan

²² Don Bellante dan Mark Jackson, *Ekonomi Ketenaga Kerjaan*, (Jakarta: FEUI, 1983), h.25

kerja dan modal.²³ Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Tenaga kerja telah bekerja dan terserap dalam sektor perekonomian dimana hal tersebut akan berdampak menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar. Mengacu pada uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor.

2. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi.

a. Perubahan Tingkat Upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendah biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal berikut :

- 1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau

²³ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia...*, h.52

membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau “*scale-effect*”.

- 2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau “*substitution-effect*”.²⁴

b. Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja :

- 1) Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

²⁴ Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.205

- 2) Harga barang-barang modal: apabila harga barang-barang modal turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini, produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah besar. Di samping itu, permintaan akan tenaga kerja dapat bertambah besar, karena peningkatan kegiatan perusahaan.

Efek kedua yang akan terjadi apabila harga barang-barang modal turun adalah efek substitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen cenderung untuk menambah jumlah barang-barang modalnya (mesin-mesin), sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi, secara relatif penggunaan tenaga kerjanya adalah berkurang. Konsep dasar permintaan tenaga kerja seperti yang dikemukakan di atas telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi tenaga kerja dengan menggunakan model-model yang cukup kompleks. Fungsi produksi memperlihatkan hubungan yang terjadi antara berbagai input faktor produksi dan output perusahaan. Dengan teknologi tertentu, semakin banyak input pekerja dan modal yang digunakan, semakin besar output yang dihasilkan.

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga atau kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja permintaan adalah hubungan antara tingkat upah, (yang ditilik dari perspektif majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan dalam hal ini dapat dikatakan dibeli. Dalam banyak literatur

ekonomi mengemukakan permintaan akan suatu produk (harga dan jasa) akan ditentukan banyak faktor, dimana faktor tersebut adalah : Harga barang itu sendiri, Harga barang lain yang sejenis, Pendapatan konsumen, Selera konsumen dan Ramalan konsumen mengenai keadaan dimasa yang akan datang²⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa setelah sejumlah pekerja digunakan, output mulai meningkat dengan tambahan yang makin kecil. Keadaan ini merupakan ciri setiap proses produksi dalam jangka pendek. Hasil yang mengecil mempunyai implikasi yang penting bagi analisis ekonomi. Implikasi utamanya adalah bahwa perusahaan hanya mau menggunakan tambahan input pekerja dengan upah yang lebih rendah, karena setelah sejumlah pekerja digunakan, setiap tambahan pekerja akan memberi tambahan output yang lebih kecil.²⁶

Perusahaan mempekerjakan seorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand*. Dalam ekonomi pasar diasumsikan seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga. Perusahaan disebut *price taker*, perusahaan sebagai penerima harga pasar yang berlaku dan tidak dapat merubah harga dengan menaikkan atau

²⁵ Payaman simanjutak, pengantar ekonomi sumberdaya manusia (jakarta : fakulas ekonomi UI, 2005), h 105

²⁶ Afrida, *Ekonomi Sumber Daya ...*, h.206

menurunkan produksinya. Perusahaan dapat menjual berapa saja produksinya dengan harga yang berlaku. Dalam memaksimumkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang dapat dipekerjakannya.

3. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan atau jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak.

Sebetulnya penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja, apakah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih santai (tidak produktif tetapi konsumtif) atau merupakan kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya apabila penghasilan tenaga kerja relatif cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja.

Menurut G. S Becker, kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang di inginkan.²⁷

Elastisitas permintaan akan tenaga kerja di definisikan sebagai persentasi perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah, secara umum dapat di tulis dengan persamaan.

$$= \frac{\Delta}{\Delta} : \frac{\Delta}{\Delta}$$

Dimana e adalah elastisitas permintaan akan tenaga kerja, N adalah perubahan jumlah pekerja yang terjadi. N adalah jumlah yang bekerja mula-mula, W adalah tingkat upah yang sedang berlaku, W adalah besarnya perubahan tingkat upah. Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang di pekerjakan menurun dan sebaliknya. Oleh sebab itu elastisitas permintaan akan tenaga kerja juga negatif.

²⁷ Maimun Sholeh, "Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (April 2007), h.66

Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari empat faktor, yaitu :

- a. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain.
- b. Elastisitas permintaan terhadap barang yang di hasilkan
- c. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi.
- d. Elastisitas persediaan dari faktor produksi perlengkapan lainnya.²⁸

C. Konsep Inflasi

1. Definisi Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama.²⁹ Definisi inflasi memiliki banyak ragam seperti yang dapat kita temukan dalam literatur ekonomi. Keanekaragaman definisi tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian.

Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan persepsi tentang inflasi, demikian pula dalam memformulasi kebijakan untuk solusinya. Prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilema ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin

²⁸ Maimun Sholeh, Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol 4 No 1 April 2007, h.66

²⁹ Tajul Khawalaty, *Inflasi dan Solusinya*..., h.6

lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara.³⁰

Menurut Teori kuantitas (teori kaum klasik) menyatakan bahwa proses terjadinya inflasi disebabkan oleh adanya volume uang yang beredar dan perkiraan masyarakat akan adanya kenaikan harga. Mankiw menyebutkan bahwa bank sentral, mengawasi jumlah uang beredar dan memiliki kendali tinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil maka harga pun akan ikut stabil. Tetapi apabila bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar maka tingkat harga akan meningkat dengan cepat.³¹

Definisi inflasi menurut Sadono Sukirno adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu ekonomi.³² Sedangkan dalam Mandala Manurung pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.³³ Menurut Adi Warmankarim secara umum Inflasi berarti kenaikan tingkat harga dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dianggap sebagai fenomena menoter yang terjadi penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap komoditas.³⁴

Dari beberapa pengertian inflasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan harga-harga

³⁰ *Ibid.* h.5

³¹ Mankiw Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro, edisi keempat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.98

³² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar ...*, h.14

³³ Prathama Rahardja & Mandala Manung, *Pengantar ilmu ...*, h.89

³⁴ *Ibid.* h.91

secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas dan kebanyakan barang tetapi tingkat kenaikannya berbeda.

2. Menentukan Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi terjadi karena disebabkan kenaikan harga-harga secara umum baik dalam bentuk barang maupun jasa pada jangka waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku.

Mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen atau lebih dikenal dengan istilah Consumer Price Index (CPI) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Laju Inflasi pada tahun} = \frac{\text{IHKn} - \text{IHKo}}{\text{IHKo}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu n

IHK₀ : Indeks Harga Konsumen pada waktu sebelumnya³⁵

³⁵ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.20

Inflasi yang terjadi didalam suatu perekonomian memiliki beberapa pengaruh sebagai berikut:

- a. Inflasi dapat mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat. Sebab distribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil orang lain jatuh. Namun parah atau tidaknya pengaruh inflasi terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut adalah sangat tergantung pada apakah inflasi itu bersifat dapat diantisipasi ataukah tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Inflasi yang tidak dapat diantisipasi sudah barang tentu mempunyai akibat yang jauh lebih serius terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan, dibandingkan inflasi yang dapat diantisipasi.
- b. Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalahkan sumberdaya dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif. Ini disebut sebagai “Efficiency Effect of inflation”.
- c. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan didalam output dan kesempatan kerja, dengan cara lebih langsung dengan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan, dan juga memotivasi orang untuk bekerja

lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini. Ini disebut “output and employment effect of Inflation”.

- d. Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi dimasa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank atau lembaga peminjaman lainnya, jika sekiranya mereka menduga bahwa tingkat inflasi akan menaik dimasa mendatang, maka mereka akan mengenakan tingkat bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan.³⁶

3. Dampak Inflasi

Inflasi sesungguhnya mengandung dampak negative dan positif, namun inflasi sering lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Menurut para ahli ekonomi, baik yang konvensional maupun ekonomi islam. Inflasi mempunyai akibat buruk bagi perekonomian, secara umum dampak inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan. Seperti yang dijelaskan bahwa *hyperinflation* sangat merugikan masyarakat, baik produsen, konsumen maupun pemerintah sendiri.

³⁶ *Ibid*, h.56

Dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya inflasi akan mengganggu stabilitas ekonomi dengan mersak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika tidak dapat ditangani maka akan susah untuk dikendalikan. Inflasi cenderung akan bertambah cepat dan berdampak buruk terhadap individu dan masyarakat.³⁷ Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat diantaranya :

a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

b. Memburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.³⁸

³⁷ Prathama Raardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: FEUI, 2008), h.371

³⁸ *Ibid*, h.372

4. Hubungan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Inflasi yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan tenaga kerja. Dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi terjadi.

Perusahaan akan menambah jumlah output apabila masih terjadi inflasi ringan. Keinginan perusahaan menambah output tentu juga dibarengi penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dengan kondisi itu maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akan mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan.

Begitupun sebaliknya, apabila inflasi tergolong berat (hyper inflation) maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja. Sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin berkurang dan pengangguran bertambah.³⁹

Menurut teori kuantitas (kaum klasik) pada proses volume uang yang beredar, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar dalam masyarakat (uang giral dan kartal). Penambahan jumlah uang yang beredar ini merupakan sumber utama penyebab inflasi, karena volume uang yang beredar lebih besar dari

³⁹ Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah ...,* h.30

kesanggupan output untuk menyerapnya (volume uang lebih besar dari pada pendapatan). Bila jumlah uang yang beredar tidak ditambah, maka inflasi akan berhenti secara otomatis apapun penyebab kenaikan harga-harga dalam perekonomian tersebut.

Apabila adanya pemikiran masyarakat akan mengalami kenaikan harga bahwa dalam perkiraan masyarakat akan ada perubahan harga walaupun ada penambahan uang (tidak besar) tidak akan menyebabkan inflasi, karena perubahan harga yang terjadi masih kecil. Apabila akan ada perubahan harga yang cukup besar dan penambahan uang yang beredar, maka penambahan uang yang beredar tersebut akan dibelanjakan masyarakat, karena masyarakat ingin menghindari kerugian yang timbul seandainya mereka memegang uang tunai.

Hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi dengan meningkatnya harga juga diiringi dengan penambahan uang yang beredar. Bila masyarakat mengharapkan harga-harga naik di masa yang akan datang, maka penambahan uang yang beredar akan sepenuhnya akan diwujudkan dalam permintaan efektif di pasar. Sehingga dengan laju volume uang yang beredar diikuti dengan kenaikan permintaan barang-barang akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga atau inflasi.⁴⁰

⁴⁰ Mankiw Gregory, *Pengantar Ekonomi ...*, h. 99

D. Konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

1. Definisi PDRB

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pembangunan maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat ditunjukkan oleh kenaikan PDRB.⁴¹

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.⁴² Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat.

⁴¹ Amri Amir, "Analisis Pertumbuhan ekonomi, investasi dan inflasi di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 1 No. 02, Januari 2013, h.15

⁴² Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan...*, h.26

Menurut Slow-Swam, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti, pertumbuhan penduduk, tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja yang dapat dilihat dari tingkat PDRB. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor produksinya. Dengan kata lain selanjutnya akan terus berkembang dan semua itu bergantung pada penambahan penduduk, tenaga kerja optimal dan terserapnya tenaga kerja.⁴³

Salah satu indikator yang dianggap penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam daerah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar.⁴⁴

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada

⁴³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi ...*, h.72

⁴⁴ BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*, Katalog: 9302021.1871, h.4

potensi sumber daya alam dan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya.

2. Metode Perhitungan PDRB

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Produk regional domestik bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu :

- 1) Pertanian,
- 2) Pertambangan dan Penggalian,
- 3) Industri Pengolahan,
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih,
- 5) Bangunan,
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran,
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi,
- 8) Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,

9) Jasa-jasa.

b. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk regional domestik bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) Perubahan stok
- 5) Ekspor netto
- 6) Menurut Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.⁴⁵

Produk regional domestik bruto merupakan jumlah balas jasa diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi

⁴⁵ Kuncoro, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h.35

dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

3. Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Produk regional domestik bruto (PDRB) dapat dilihat sebagai perekonomian total. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan kerja baru dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja guna untuk meningkatkan faktor produksi perusahaan tersebut. Dengan demikian akan dapat mengurangi jumlah angka pengangguran jika terjadi peningkatan tenaga kerja.⁴⁶

Apabila produk domestik regional bruto meningkat maka permintaan jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, dimana peningkatan produk domestik regional bruto berbanding dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran masyarakat juga bertambah. Ketika kemakmuran masyarakat bertambah akan menyebabkan banyaknya atau tersedianya lowongan pekerjaan yang berdampak akan mengurangi angka pengangguran.⁴⁷

Pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi yang dapat dilihat dari tingkat PDRB. Pandangan ini

⁴⁶ N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi keempat, (Jakarta: Erlangga, 2000), h.45

⁴⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1997), h. 52

beranggapan bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor produksinya. Dengan kata lain selanjutnya akan terus berkembang dan semua itu bergantung pada penambahan penduduk, tenaga kerja optimal dan terserapnya tenaga kerja.⁴⁸

E. Konsep Upah Minimum

1. Penggolongan dan Jenis-jenis Upah

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluar ganya atas suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa upah merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Pemerintah memberi perhatian yang penuh pada upah berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 bahwa setiap

⁴⁸ Lincolin Arsyad, *Ekonomi ...*, h.72

⁴⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.107

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi peghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak.

Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, terdiri atas :

- a. Upah Minimum
- b. Upah Keja Lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena halangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Danda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahn yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan⁵⁰

2. Definisi Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh

⁵⁰ *Ibid.* h.108

yang bekerja diperusahaannya.⁵¹ Upah minimum merupakan sumber perdebatan politik yang tidak ada habisnya. Para pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandang sebagai sarana meningkatkan pendapatan para pekerja miskin. Meskipun para pendukung upah minimum mengakui kebijakan itu menyebabkan pengangguran bagi sebagian pekerja, namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan ini setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lain.

Menurut Hasibuan menyatakan bahwa Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁵² Sedangkan menurut Edwin B. Flippo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.⁵³

Para penentang diberlakukan upah minimum yang lebih tinggi mengklaim bahwa hal itu bukan cara terbaik untuk membantu orang-orang miskin. Mereka berpendapat bahwa bukan hanya kenaikan biaya tenaga kerja yang akan meningkatkan pengangguran, tetapi juga upah minimum tersebut salah sasaran. Banyak pekerja yang menerima upah minimum adalah para remaja yang hanya bekerja mencari tambahan

⁵¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.71

⁵² *ibid*, h.67

⁵³ G. Kartasapoetra, el. all. *Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h.93

uang saku, dan bukan kepada keluarga yang harus bekerja untuk menghidupi keluarga.⁵⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.
2. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota.⁵⁵

Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah mekanisme penetapan upah minimum juga mengalami perubahan secara signifikan, yang ditetapkan oleh Gubernur:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah, melalui Kanwil Depnaker setempat.
- b. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)/Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan Organisasi Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.⁵⁶

⁵⁴ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 161

⁵⁵ Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 128

⁵⁶ *ibid*, h. 130

Pandangan teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*) berfokus pada upah sebagai tujuan yang memotivasi buruh. jumlah usaha yang dibuat buruh dalam pekerjaannya adalah berhubungan terhadap seberapa baik pekerjaan itu membayar relatif terhadap alternatif pekerjaan lainnya. perusahaan akan bersedia membayar upah diatas upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa buruh bekerja keras agar tidak kehilangan pekerjaannya yang baik itu.

Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh diatas upah keseimbangan. Hal tersebut selain akan meningkatkan produktivitas juga akan menimbulkan loyalitas pekerja dapat membuat lebih banyak pekerja yang berkualitas.⁵⁷

Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka waktu tertentu akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja.

⁵⁷ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal.201

Berbagai pandangan mengenai upah minimum maka dapat diuraikan bahwa upah minimum merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja diperusahaannya. Sehingga dapat diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan upah terendah yang berlaku dalam satu wilayah kota/kabupaten berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

3. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah awalnya dilaksanakan setiap tahun. Awalnya penetapan upah tersebut berproses sangat lama dan panjang, Dewan Pengupah Daerah (DPD) yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan buruh sepakat membentuk sebuah tim survey untuk melihat langsung kondisi lapangan, dimana apa saja kebutuhan yang dibutuhkan pegawai dan berapa harganya. Dari hasil survey tersebut diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Tim DPD kemudian mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Upah Minimum Regional adalah standar terendah yang digunakan para pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai atau karyawan dalam lingkup perusahaannya. Kebutuhan hidup layak dijadikan pedoman penentu upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang. Saat ini UMR juga sering disebut dengan istilah Upah Minimum Provinsi

(UMP) karena ruang lingkupnya mencakup satu provinsi. Setelah itu dikenal juga dengan istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dalam penetapan usulan upah minimum agar mempertimbangkan pendekatan dan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Kebutuhan hidup minimum (KHM) Dimaksudnya agar upah dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Karena terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja akan mendorong naiknya tingkat kesehatan, gizi kerja, yang pada akhirnya menaikkan daya kerja atau produktivitas kerja.
- b. Indeks harga konsumen (IHK) Untuk melihat nilai riil/daya beli tidak sekedar jumlah nominal upah. dalam mempertahankan daya beli idealnya setiap kenaikan inflasi harus diikuti kenaikan upah. namun kenaikan upah yang demikian bersifat inflatoir. Oleh karena itu pada saat inflasi tinggi dan kenaikan upah tidak berjalan dengan kebijaksanaan moneter, fiskal dan kebijaksanaan disektor riil maka dapat dapat berpengaruh buruk terhadap daya beli pada tahap berikutnya.
- c. Kondisi pasar kerja Untuk melihat pengaruh upah terhadap kemungkinan perluasan kesempatan kerja dan rasional, kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat berakibat pada pengurangan penggunaan faktor produksi/tenaga kerja atau dengan kata lain akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

- d. Upah yang berlaku secara regional (perbandingan) Untuk melihat keseimbangan upah, sehingga tidak terdapat perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah atau provinsi. Tingkat upah merupakan faktor pendorong dan penarikan tenaga kerja untuk melakukan migrasi antar daerah maupun migrasi sektor dengan tujuan dengan tujuan upah yang lebih tinggi.
- e. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan Untuk melihat pengaruh kenaikan upah tidak berakibat pada penurunan produksi, bahkan penutupan perusahaan.
- f. Tingkat perkembangan ekonomi Untuk melakukan penyesuaian/ kenaikan upah dengan kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat.⁵⁸

4. Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tinggi rendahnya yang mempengaruhi biaya produksi perusahaan adalah tingkat upah para tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, sehingga akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut. Sehingga akan muncul perubahan skala produksi yang disebut efek skala produksi (scale effect) dimana sebuah kondisi yang memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan dan selanjutnya dapat mengurangi tenaga kerja perusahaan. Suatu

⁵⁸ Suharto, *Tenaga Kerja Dan Upah Minimum*, Laporan Hasil Penelitian, (Departemen Agama Iain Raden Intan Bandar Lampung Pusat Penelitian, 2003), h.107

kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (substitution effect).

Naiknya upah maka akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi perusahaan, yang mana akan meningkatkan harga barang per unitnya. Biasanya akan cepat memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga pada suatu barang sehingga tingkat konsumsi akan menurun. Sehingga banyak produk yang tidak habis terjual karena berkurangnya konsumsi masyarakat dan perusahaan memaksa untuk mengurangi jumlah produksinya.

Adanya pengurangan jumlah produksi suatu barang maka akan membuat kebutuhan akan tenaga kerja berkurang, dari hal tersebut maka akan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akibat penurunan skala produksi. Apabila upah naik terdapat pengusaha yang lebih memilih untuk menggunakan teknologi untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin.⁵⁹

Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain.

⁵⁹ Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009), h.65

Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya relatif lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Fungsi upah secara umum, terdiri dari. Pertama, untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya tenaga manusia secara efisien untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. Sistem pengupahan adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja kearah produktif. Ketiga, untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien pembayaran upah yang relatif tinggi adalah mendorong manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien.

Cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah sesuai dengan keperluan hidupnya. Keempat, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem, pengupahan diharapkan dapat merangsang, mempertahankan stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁰

⁶⁰ Divianto, Pengaruh Upah Modal Produktivitas Dan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil Menengah Di Kota Palembang, *Jurnal Ekonomi Dan Informatika Akuntansi (Jenius)*, Vol 4 No 1, Januari 2014, h 50

F. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Eknomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.⁶¹ Ekonomi islam juga merupakan ilmu yang dihasilkan dari sebuah upaya manusia untuk keluar dari persoalan ekonomi dengan cara yang sistematis, sehingga akan menumbuhkan keyakinan akan kebenaran Al-qur'an dan Hadits.

Ekonomi islam dapat juga dikatakan sebagai yang mewakili Al-qur'an dan Hadits karena membangun kehidupan manusia dalam hal yang lebih baik dari konsep ekonomi manapun. Hal ini sejalan dengan definisi Chapra yang menyebutkan bahwa ekonomi islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi, ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berpanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.⁶²

Ekonomi islam dapat ditinjau dari perilaku orang islam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produksi hingga distribusi sistematis. Dari pemenuhan yang sedemikian rupa yang memang pada akhirnya ini yang menjadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan ekonomi untuk selanjutnya. Kondisi ini tidak lain karena dipengaruhi

⁶¹ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h.19

⁶² Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.121

oleh ritme pemenuhan kebutuhan manusia dibatasi oleh faktor keterbatasan fisik dan psikis manusia itu sendiri. Hal ini perlu dipahami guna mendapatkan metode kerja yang lebih efisien dan lebih memberikan makna terhadap kehidupan manusia.

Sebagaimana dikatakan oleh Khursid Ahmad yaitu bahwa ekonomi islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif islam.⁶³ Sedangkan kegiatan manusia antar daerah satu dengan yang lain berbeda, hal ini disebabkan adanya perbedaan geografis, ideologi, dan demografi yang menjadikan masalah ekonomi dihadapi manusia berbeda.

Hal ini terkadang membuat kegiatan manusia yang menuntut interaksi antar satu dengan yang lain kurang efektif. Maka upaya untuk mengantisipasi hal tersebut hendaknya dikembalikan pada Al-qur'an dan Hadits untuk menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Karena berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan berproduksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun kelompok atau negara sesuai ajaran islam) atau berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.

⁶³ *Ibid*, h.12

2. Nilai-nilai Ekonomi Islam

Menurut Syafe'i, ada 3 nilai-nilai dalam ekonomi islam yaitu:

- a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim saja, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma islam.
- b. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Karena sebuah persaudaraan yang universal dan tidak diikat oleh batas geografis.

Keadailan dalam islam memiliki implikasi sebagai berikut:

1) Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga, karena semua anggota mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah swt. Hukum Allah swt tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian pula dengan tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan yang satu dengan yang lain yaitu ketakwaannya, ketulusan hatinya, kemampuan dan pelayanannya kepada masyarakat.

2) Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hokum harus

diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbang tersebut, maka keadilan ekonomi akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya, karena islam dengan tegas melarang seorang muslim melakukan hal yang merugikan orang lain.

3) Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen islam terhadap persudaraan dan keadilan sosial ekonomi, karena kesenjangan tersebut harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan dalam agama islam.

c. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Islam mengakui padangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain.

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

- a. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal atau pikiran. Jangan biarkan akal atau pikiran terlepas dari

landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan atau keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.

- b. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
- c. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
- d. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.
- e. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan.⁶⁴

⁶⁴ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan penngembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.5

3. Tenaga Kerja dalam Pandangan Ekonomi Islam

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun fikiran. Tenaga kerja sebagai suatu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dikembangkan oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan.⁶⁵

Menurut imam syaibani bahwa kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan allah swt untuk menutupi kebutuhan manusia.⁶⁶ Islam pun mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah swt seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, Economic Doctrines Of Islam, Terjemahan Soeroyo Dan Nastangin*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.248

⁶⁶ Nurul Huda Et.Al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.227

sebagainya.⁶⁷ Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S At-taubah (9) Ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa dalam islam sangat menganjurkan untuk bekerja, karena dengan bekerja kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal dan setiap pekerjaan atau tingkah laku akan mendapatkan amal atau dosa, baik yang besar ataupun yang kecil pasti akan diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya pada hari kiamat serta akan mendapat pertanggung jawaban kelak diakhirat.

Begitupun hadits Rasulullah saw banyak yang mengarahkan umat manusia agar bekerja dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarah dan bimbingan dari Al-qur'an seperti yang disebutkan di atas, diantaranya:

⁶⁷ Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, h.50

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Dari Aisyah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR.Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras pada seseorang merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicari melalui ketekunan dan kerja keras. Di samping itu, manusia hendaknya untuk melakukan dan menanggung segala kesukaran dan kesusahan dalam perjuangannya untuk mencapai kemajuan.

Manusia harus selalu bekerja dan dilarang untuk bermalas-malasan, bahkan hal ini diterangkan di dalam Q.S. Asy-Syarah (94) Ayat 7 yang berbunyi :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila Muhammad saw telah selesai berdakwah maka beribadahlah kepada Allah, apabila telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat, dan apabila telah selesai mengerjakan shalat maka berdoalah. Dari ayat diatas dijelaskan kembali bahwa manusia harus bekerja, dan ketika

telah selesai dari suatu pekerjaan maka harus mengerjakan pekerja yang lain. Pekerjaan yang dimaksud disini bukan hanya pekerjaan untuk akhirat seperti beribadah tetapi juga pekerjaan dalam konteks dunia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk menganggur dan bermalas-malasan. Karena dengan bekerja maka hidup seseorang akan menjadi lebih makmur, kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, bahkan mereka dapat memberikan sebagian pendapatan mereka untuk orang-orang yang membutuhkan seperti orang fakir, orang miskin, dan lain sebagainya. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (muslim dan non muslim) secara menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa.⁶⁸

Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat maupun negara. Menurut islam negara harus menetapkan suatu strategi politik dan mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai jaminan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Di antara mewajibkan warganya bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah swt.

4. Inflasi dalam Pandangan Ekonomi Islam

Inflasi (*Inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Taqyuddin Ahmad Ibn Al-Maqrizi (1364M-1441M) menyatakan bahwa Inflasi

⁶⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012), h.193

terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus dengan mengungkapkan berbagai fakta.⁶⁹

Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang sama. Dalam uraian berikutnya, Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail.⁷⁰

Taqiuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi (1364M–1441M) mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu :

a. Inflasi Alamiah

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Dilain pihak karena

⁶⁹ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal.15

⁷⁰ Awaluddin, “Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16 No. 2 (Desember 2017), h.213

sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang tersebut mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit dan kematian dikalangan masyarakat.

Keadaan yang semakin memburuk memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Untuk menaggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastic karena disisi lain pemerintah tidak mendapatkan pemasukan yang berarti. Dengan kata lain pemerintah mengalami deficit anggaran Negara baik secara politik, ekonomi, maupun sosial, dan menjadi tidak stabil yang kemudian pemerintahan.

Al-Maqrizi menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi terutama di sektor produksi mengalami kemacetan. Ketika situasi lebih normal, persediaan barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap tidak

beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.

b. Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang menyebabkan terjadinya inflasi jenis kedua ini yaitu: korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi mata uang (fulus).⁷¹

5. PDRB dalam Pandangan Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul mal. Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur ar-Rasidin dengan mengeluarkan dana Baitul mal. Kedua jenis

⁷¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 25

kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

Menurut Al-Ghazali, dalam membangun suatu perekonomian tidak hanya berhenti pada tujuan materi semata, tetapi disana ada akhirat yang harus dipenuhi oleh pelaku aktivitas ekonomi. Sehingga dalam hal ini, Al-Ghazali membuat klarifikasi pelaku aktivitas ekonomi ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- a. Mereka hanya memenuhi kebutuhan materi semata dan melupakan akhiratnya sebagai tempat mereka kembali sehingga tergolong orang yang merugi.
- b. Mereka yang menganggap akhirat itu sebagai rambu segala aktivitas ekonomi mereka dan mereka itulah yang untung.
- c. Mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama diakhirat dalam setiap aktivitas ekonomi dan mereka itulah yang berada pada jalan yang lurus.

Dengan hal diatas, Al-Ghazali hendak menunjukkan betapa pengaruh tujuan sangat besar dalam mempengaruhi pola aktivitas perekonomian. pada aktivitas perekonomian tersebut hanyalah sebagai jalan untuk menggapai karunia Allah swt. Oleh karna itu, internalisasi nilai-nilai ataupun norma dalam aktivitas perekonomian menjadi sebuah

keharusan. Al-Ghazali menjadikan Al-Qur'an dan tradisi Rasulullah sebagai landasan aktivitas pola pengembangan ekonomi.⁷²

Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- b. Mensejahterakan keluarga.
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera Islam adalah sebagai berikut:

- a. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- b. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
- c. Menjaga hukum dan ketertiban.
- d. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.
- e. Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.⁷³

⁷² Yusno Abdullah, "Sistem Pemikiran Islam Imam Al-Ghazali", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 09, No. 02, Agustus 2011, h.5

⁷³ Lalu Muhammad Iswandi, *Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*, (NTB : IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, 2013) h. 374

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan Pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang di alami oleh faktor produksi tidak di anggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti yang memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.⁷⁴

6. Upah Minimum dalam Pandangan Ekonomi Islam

Menurut Al-Sayid Sabiq mengatakan bahwa *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* (ganti). Oleh sebab itu *al sawah* (pahala) dinamakan *ajru* (upah) menurut pengertian syara’.⁷⁵ Sehingga *alijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya’jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.⁷⁶ Al-Syarbini mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di

⁷⁴ *Ibid.* h. 376

⁷⁵ Al-Sayyid Shabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin dan A. Marzuki (Bandung : Al-Ma’arif, 1993), h. 15

⁷⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 101

mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'*.⁷⁷

Dilihat dari objek *Ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *Ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :

- a. *Ijarah ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewah rumah.
- b. *Ijarah amal*, yakni *ijarah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, *ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga.

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah* mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. Dan *ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu

⁷⁷ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani, 2005), h. 363

pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.⁷⁸

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penyerapan tenaga kerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah :

1. **Arif Budiarto dan Made Heny Urmila Dewi**, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi Di Provinsi Bali” Penelitian ini memfokuskan masalah pada ketenagakerjaan yang salah satunya dapat dikurangi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tergantung kepada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri.. Metode analisis yang digunakan adalah metode observasi non partisipan dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan - bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data runtut waktu yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil analisis data menunjukkan, bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja.

⁷⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers; 2016), h.131

Upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja dan bukan merupakan variabel mediasi pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja.⁷⁹

2. **I Gustika Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha**, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali” Penelitian ini memfokuskan masalah pada tingginya angka pengangguran nantinya akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat seperti kriminalitas dan fenomena-fenomena lainnya. Provinsi Bali dengan potensi pariwisatanya ternyata masih memiliki jumlah pengangguran yang cukup banyak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga faktor yang secara teori memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut di Provinsi Bali adalah inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian bersifat asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data time series selama dua puluh tahun. Analisis yang

⁷⁹ Arif Budiarto, Made Heny Urmila Dewi, “Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi Di Provinsi Bali”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4, No. 10, (Oktober 2015), h.1219-1229

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data diolah dengan menggunakan Eviews.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. 2) Variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. 3) Variabel PDRB secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. 4) Variabel upah minimum secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.⁸⁰

3. **Martini**, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Produk Domestik Bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi baik secara parsial maupun simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006-2013”. Penelitian ini memfokuskan masalah pada pengaruh Produk Domestik Bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi baik secara parsial maupun simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006-2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian bersifat asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Koperasi dan UKM di Indonesia. Analisis yang

⁸⁰ I Gustika Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha, “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4, No. 8, (Agustus 2015), h.923-950

digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model regresi *Random Effect*. Data diolah dengan menggunakan *Eviews 9*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto sektoral berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien 1,212 dan signifikansi 0,0000. Rata-rata upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien 0,771 dan signifikansi 0,0000. Investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien -1,470 dan signifikansi 0,0000. Produk Domestik Bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kesempatan Kerja dengan nilai F statistik 28.849 dan signifikansi 0,0000.⁸¹

4. **Febryana Rizqi Wasilaputri**, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pdrb Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”. Penelitian ini memfokuskan masalah yang dihadapi diantaranya peningkatan angkatan kerja yang lebih tinggi daripada penyerapan tenaga kerja. Upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti upah minimum provinsi, PDRB dan investasi. Metode analisis

⁸¹ Martini, “Pengaruh Produk Domestik Bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi baik secara parsial maupun simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006-2013”. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol. 5, No. 5, (2016), h.436-439

yang digunakan adalah metode penelitian bersifat asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah minimum provinsi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 2) PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 3) Investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; 4) Upah minimum provinsi, PDRB dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.⁸²

5. **Zulkarnain Nasution**, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Investasi PAD dan Jumlah Unit UKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UKM Di Kabupaten Labuhanbatu” Penelitian ini memfokuskan masalah pada proses kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja maka penduduk atau masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja akan mendapatkan pekerjaan yang tentunya akan memberikan penghasilan, dari penghasilan ini kemudian akan dapat berubah menjadi konsumsi. Metode analisis yang digunakan

⁸² Febryana Rizqi Wasilaputri, “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pdrb Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol. 5, No. 3, (2016), h.243-245

adalah metode penelitian bersifat asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara simultan Investasi UKM, PAD dan jumlah unit usaha UKM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2007-2016. 2) Secara parsial hasil estimasi data panel dengan menjelaskan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2007-2016. 3) Secara Parsial Investasi UKM dan jumlah unit usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2007-2016.⁸³

H. Kerangka Pemikiran

Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan suatu daerah. Dapat dilihat dari strategi pembangunan dan sasaran tujuan daerah harus benar-benar memperhatikan aspek sumberdaya manusia dalam memasuki lapangan kerja. Kondisi pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dan pertumbuhan penduduk yang bekerja pada Kota Bandar Lampung pada tahun 2009-2017 mengalami perbandingan yang fluktuatif. Sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan

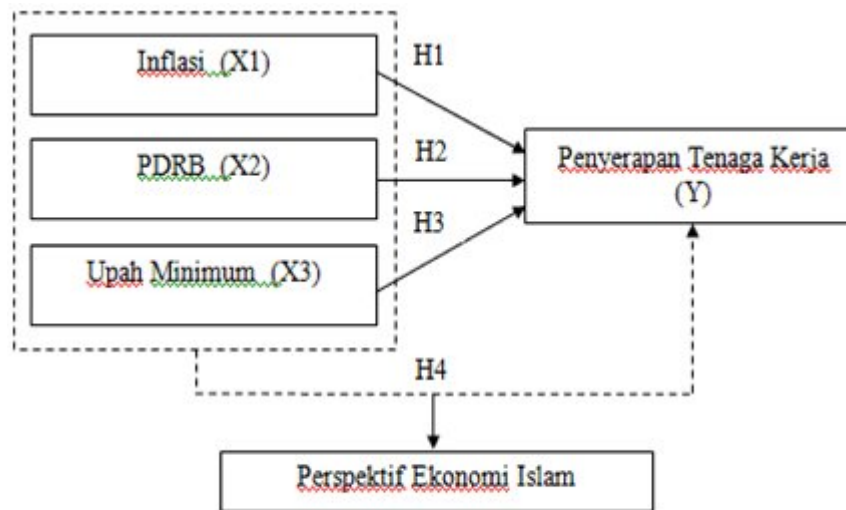
⁸³ Zulkarnain Nasution, "Analisis Investasi, PAD dan Jumlah Unit UKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UKM Di kabupaten Labuhanbatu". *Jurnal Ekobisma*. Vol. 5, No. 1, (Januari 2018), h.1-11

jumlah penduduk usia kerja dan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja pada Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017.

Pada Kota Bandar Lampung ada beberapa potensi yang sangat mendukung salah satunya yaitu pada potensi lokasi geografis yang sangat strategis dan ternyata masih memiliki jumlah penduduk yang terlalu besar dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten lainnya. Pada posisi geografis tersebut mengantar Kota Bandar Lampung untuk meraih peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi regional maupun menjadi bagian dari koridor kegiatan ekonomi. Karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat maka angka pengangguran akan berkurang. Dalam hal ini semakin berkembangnya potensi yang sangat mendukung dengan potensi lokasi geografis maka dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja.

Menurut Handoko teori tentang penyerapan tenaga kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 indikator yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRB. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah minimum. Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam gambar berikut ini adalah dimana variabel (X1) yaitu inflasi, variabel (X2) yaitu PDRB dan variabel (X3) yaitu upah minimum berpengaruh terhadap variabel (Y) yaitu penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Keterangan :

———— : Secara Parsial

----- : Secara Simultan

Kerangka pemikiran diatas ini menunjukan apakah penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh inflasi, PDRB dan upah minimum secara parsial dan simultan, kemudian dilihat bagaimana dalam perspektif ekonomi islam.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁸⁴ Maka dengan mengacu

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.99

pada latar belakang masalah, rumusan masalah serta kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Ho : Tidak Ada Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

H1 : Ada Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

2. Ho : Tidak Ada Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

H2 : Ada Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

3. Ho : Tidak Ada Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

H3 : Ada Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

4. Ho : Tidak Ada Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

H4 : Ada Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Lybrary Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, dokumen yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat di seluruh bahan cetakan, sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh orang lain, maupun hasil laporan penelitian terdahulu mengenai penyerapan tenaga kerja yang terjadi di beberapa sektor.⁸⁵ Penelitian ini menggali data yang bersumber dari data survey tahunan dan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung.

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif (Hubungan), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.⁸⁶ Peneliti dapat melihat pengaruh dengan menguji hubungan dari data variabel bebas yaitu inflasi, PDRB, upah minimum dan data variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017.

⁸⁵ Iqbal Hasan, *Metode Penelitiannya dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.45

⁸⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Cetakan Pertama* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2015), h.16

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁸⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.⁸⁸ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah menggunakan data selama lima tahun yaitu dari tahun 2009-2017. Data ini diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang dimiliki perusahaan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸⁹

Data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.11

⁸⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian untuk Guru*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), h.50

⁸⁹ Nurul Zairah, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h.191

dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain yaitu Badan Pusat Statistik.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. Data penelitian ini juga diperoleh dari berbagai sumber seperti buku teori, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu yang memuat teori penelitian serta sumber-sumber pustaka lainnya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu pengetahuan abstrak yang menunjukkan totalitas dari seluruh obyek penelitian.⁹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data laporan tahunan ketenagakerjaan, inflasi, PDRB dan upah minimum pertahun di Kota Bandar Lampung yang telah dipublikasikan oleh BPS Kota Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan obyek pengamatan yang dipilih dari populasi.⁹¹ Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan ketenagakerjaan, inflasi, PDRB dan upah minimum pertahun di Kota

⁹⁰ Gunawan Sumodiningrat, *Ekonometrika Pengantar*, (Yogyakarta : BPFE, 1999), h.3

⁹¹ *Ibid.*

Bandar Lampung yang telah dipublikasikan oleh BPS Kota Bandar Lampung yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu 9 tahun.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk digunakan sebagai penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel 9 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2017.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Bebas (X)

Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah

- a. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama.⁹²
- b. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.⁹³
- c. Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja diperusahaannya.⁹⁴

⁹² Tajul Khawalty, *Inflasi dan Solusinya*..., h.6

⁹³ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan*..., h.26

⁹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*..., h.71

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja yaitu banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi.⁹⁵

F. Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode Ordinal Least Square (OLS) untuk seluruh persamaannya. Sedangkan pendekatan bersifat asosiatif (Hubungan), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.⁹⁶

Pemilihan model persamaan ini didasarkan pada penggunaan model logaritma natural (Ln) yang memiliki keuntungan, yaitu menyamakan satuan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas karena transformasi yang menempatkan skala untuk pengukuran variabel dan koefisien kemiringan agar langsung dapat menunjukkan elastisitas Y terhadap Xi yaitu persentase perubahan dalam Y akibat adanya persentase perubahan dalam Xi.⁹⁷ Karena salah satu syarat yang mendasari penggunaan model regresi adalah terpenuhinya semua asumsi klasik, agar pengujian bersifat efisien.

⁹⁵ Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, *Pengaruh Investasi Dan Konsumsi ...*, h.14

⁹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis...*, h.16

⁹⁷ Damodar Gujarati, *Ekonometri Dasar*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.89

G. Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.⁹⁸ Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode *Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.⁹⁹

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linier. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari

⁹⁸ Duwi Priyatno, *Paham Analisis Data Dengan SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2010), h.71

⁹⁹ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h.52

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan VIF > 10 . Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinieritas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinieritas).¹⁰⁰

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu maka dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi linier memiliki problem autokorelasi.¹⁰¹ Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji durbin-watson (uji dw). Apabila hasilnya tidak dapat disimpulkan maka peneliti menggunakan metode untuk mendeteksi kembali apakah ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Runs Test, sebagai bagian dari statistic non-parametric dapat pula digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

¹⁰⁰ Imam Ghazali I, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), h.95

¹⁰¹ Suriyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.116

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.¹⁰² Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Spearman's Rho yang bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas antara residual dengan masing-masing variabel. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).¹⁰³

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), yakni pengaruh Inflasi (X1), PDRB (X2) dan Upah Minimum (X3) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y).

¹⁰² *Ibid*, h. 120

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi...*, h.228

Analisis regresi ganda dapat dijabarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja)

X1 = Variabel Independen (Inflasi)

X2 = Variabel Independen (PDRB)

X3 = Variabel Independen (Upah Minimum)

a = konstanta yaitu (nilai Y bila X1, X2, X3) = 0

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas/dependen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).¹⁰⁴ Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1, H_2, H_3 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

¹⁰⁴ Imam Ghazali III, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013), h.98

- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1, H_2, H_3 diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent.¹⁰⁵

Kriterianya adalah :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_4 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini membuktikan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

¹⁰⁵ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.162

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefesien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (inflasi, pdrb dan upah minimum) terhadap variabel dependen (penyerapan tenaga kerja).¹⁰⁶



¹⁰⁶ *Ibid.* h. 110

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5o20'sampai dengan 5o30'lintang selatan dan 105o28' sampai dengan 105o37' bujur timur. Ibukota propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah yaitu 197,22 Km2 yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya Tanjung karang–Teluk betung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang – Teluk betung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang

pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan.

Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut - turut sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Walikota Bandar Lampung beserta Priode Jabatan

No.	Walikota/KDH Tingkat II	Periode Jabatan
1	SUMARSONO	Periode 1956-1957
2	H. ZAINAL ABIDIN P.A	Periode 1957-1963
3	ALIMUDIN UMAR, SH	Periode 1963-1969
4	Drs.H.M.THABRANI DAUD	Periode 1969-1976
5	Drs. H. FAUZI SALEH	Periode 1976-1981
6	Drs.H.ZULKARNAIN SUBING	Periode 1981-1986
7	Drs.H.A NURDIN MUHAYAT	Periode 1986-1995
8	Drs. H. SUHARTO	Periode 1996- 2006
9	EDY SUTRISNO, S.Pd, M.Pd	Periode 2006-2010

10	Drs. H. HERMAN HN, MM	Periode 2010 s.d. sekarang
----	-----------------------	----------------------------

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2018

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Data yang diuji sebelumnya harus memenuhi persyaratan normalitas, pengujian ini digunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov*. Data yang dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *kolmogorof-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04556477
Most Extreme Differences	Absolute	.172
	Positive	.172
	Negative	-.172
Kolmogorov-Smirnov Z		.516
Asymp. Sig. (2-tailed)		.953

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019

Hasil uji normalitas pada tabel 4.2 di atas dengan menggunakan metode *one sample kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen pada jumlah (N) sebesar 9 adalah 0,953. Berarti data dari penelitian ini berdistribusi normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,953 > 0,05$, sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Penelitian ini dilakukan terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinieritas, gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) harus berada dibawah 10.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12144	.991		12252	.000		
	INFLASI	.056	.063	.242	.900	.409	.539	1.857
	PDRB	-1.414	.544	-.641	-2.601	.048	.340	1.563
	UPAH MINIMUM	.233	.061	.929	3.829	.012	.359	1.517

a. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA

Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

3) Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian maka digunakan Uji Run Test. Uji run test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00562
Cases < Test Value	4
Cases ≥ Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	5
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019

Hasil uji autokorelasi (*Runs Test*) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 1,000 lebih besar $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi antar nilai residual.

4) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan Uji Spearman's Rho yang bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas antara residual dengan masing-masing variabel. Jika nilai signifikansi antara variabel

independen dengan residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Correlations

		INFLASI	PDRB	UPAH MINIMUM	Unstandarized Residual
Spearman's rho	INFLASI	Correlation Coefficient	1.000	.444	-.350
		Sig. (2-tailed)		.232	.798
		N	9	9	9
	PDRB	Correlation Coefficient	.444	1.000	.092
		Sig. (2-tailed)	.232		.814
		N	9	9	9
	UPAH- MINIMUM	Correlation Coefficient	-.350	.092	1.000
		Sig. (2-tailed)	.356	.814	
		N	9	9	9
	Unstandarized Residual	Correlation Coefficient	-.100	-.134	-.033
		Sig. (2-tailed)	.798	.731	.932
		N	9	9	9

Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa korelasi Inflasi dengan unstandarized residual nilai signifikansi sebesar 0,798, pada korelasi PDRB dengan unstandarized residual nilai signifikansi sebesar 0,731 dan pada korelasi Upah Minimum dengan unstandarized residual nilai signifikansi sebesar 0,932. Karena signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

b. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ganda digunakan

oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) dan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.144	.991		12.252	.000
INFLASI	.056	.063	.242	.900	.409
PDRB	-1.414	.544	-.641	-2.601	.048
UPAH MINIMUM	.233	.061	.929	3.829	.012

a. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA

Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019

Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 12,144 + 0,056X_1 - 1,414X_2 + 0,233X_3$$

Dimana :

Y = Penyerapan Tenaga Kerja

X_1 = Inflasi

X_2 = PDRB

X_3 = Upah Minimum

a = Konstanta

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan konstanta sebesar 12,144 pada persamaan regresi menunjukkan apabila variabel independen nilainya 0, maka keputusan faktor penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 12,144.
- 2) Koefisien regresi X_1 (inflasi) sebesar 0,056 artinya jika inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,056. Koefisien bernilai positif antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja yang menyatakan bahwa apabila variabel inflasi semakin tinggi maka penyerapan tenaga kerja pun semakin tinggi pula.
- 3) Koefisien regresi X_2 (PDRB) sebesar -1,414 artinya jika PDRB mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan mengalami penurunan sebesar -1,414. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi

hubungan yang tidak positif antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja. Jika PDRB meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami penurunan.

- 4) Koefisien regresi X_3 (upah minimum) sebesar 0,233 artinya jika upah minimum mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,233. Koefisien bernilai positif antara upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja yang menyatakan bahwa apabila variabel upah minimum semakin tinggi maka penyerapan tenaga kerja pun semakin tinggi pula.

c. Hasil Uji Hipotesis

1) Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen (Inflasi, PDRB dan Upah Minimum) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).¹⁰⁷ Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1, H_2, H_3 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen

¹⁰⁷ Imam Ghazali III, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013), h.98

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- b) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1, H_2, H_3 diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.144	.991		12.252	.000
	INFLASI	.056	.063	.242	.900	.409
	PDRB	-1.414	.544	-.641	-2.601	.048
	UPAHMINIMUM	.233	.061	.929	3.829	.012

a. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA

Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.7 diperoleh nilai:

- a) Variabel Inflasi (X1)

Variabel inflasi (X1) mempunyai t hitung yakni 0.900 dan nilai signifikan sebesar 0,409. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,409 > 0,05$, maka dapat

disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan taraf kepercayaan variabel inflasi (X_1) 95% tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya inflasi maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

b) Variabel PDRB (X_2)

Variabel PDRB (X_2) mempunyai t hitung yakni -2,601 dan nilai signifikan sebesar 0,048. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan taraf kepercayaan variabel PDRB (X_2) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya PDRB maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

c) Variabel Upah Minimum (X_3)

Variabel upah minimum (X_3) mempunyai t hitung yakni 3,978 dan nilai signifikan sebesar 0,011. Ketentuan

pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan taraf kepercayaan variabel upah minimum (X_3) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya upah minimum maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

2) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent.¹⁰⁸ Kriterianya adalah :

- a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima.
- b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_4 ditolak.

Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

¹⁰⁸ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.162

Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.069	3	.023	6.920	.031 ^a
	Residual	.017	5	.003		
	Total	.086	8			

a. Predictors: (Constant), UPAH MINIMUM, PDRB, INFLASI

b. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA

Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019

Adapun hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan f tabel dengan signifikan $5\% = 0,05$ (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan df_1 (N_1) = Jumlah variabel (variabel bebas + terikat) -1 atau $4-1 = 3$ sedangkan df_2 (N_2) = $n - k$ (variabel bebas) -1 atau $9-3-1 = 5$. hasil diperoleh f tabel sebesar 5,41.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.8 diperoleh F hitung yakni 6,920 dan nilai signifikan sebesar 0,031. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung $6,920 > F$ tabel 5,41 dan nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima yang artinya variabel independen (inflasi, PDRB dan upah minimum) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

dependen (penyerapan tenaga kerja). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen memiliki taraf kepercayaan 95% mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel penyerapan tenaga kerja.

3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (inflasi, pdrb dan upah minimum) terhadap variabel dependen (penyerapan tenaga kerja). Adapun hasil perhitungannya adalah :

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.898 ^a	.806	.689	.05764	2.420

a. Predictors: (Constant), UPAH MINIMUM, PDRB, INFLASI

b. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA

Sumber : SPSS 17 Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi pada output model sumary dari analisis regresi berganda tepatnya kolom R Square sebesar 0,806. Jadi pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 80,6% sedangkan sisanya 19,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Parsial Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009-2017

1) Pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja

Hasil penelitian terkait dengan pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dari tahun 2009-2017 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi X_1 (inflasi) sebesar 0,056 artinya jika inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,056. Koefisien bernilai positif antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja yang menyatakan bahwa apabila variabel inflasi semakin tinggi maka penyerapan tenaga kerja pun semakin tinggi pula.

Adapun secara parsial diketahui untuk variabel inflasi (X_1) mempunyai t hitung yakni 0.900 dan nilai signifikan sebesar

0,409. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,409 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan taraf kepercayaan variabel inflasi (X_1) 95% tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya inflasi maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan analisis diatas memiliki kesuaian dengan teori yang ada yaitu menurut teori kuantitas (kaum klasik) pada proses volume uang yang beredar, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini inflasi yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan output, volume uang yang beredar dan tenaga kerja dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi terjadi.

Apabila terjadi peningkatan inflasi yang tinggi maka akan mengalami penambahan uang yang beredar, sehingga penambahan uang yang beredar tersebut akan dibelanjakan

masyarakat agar ingin menghindari kerugian yang timbul seandainya mereka memegang uang tunai. Hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi dengan meningkatnya harga juga diiringi dengan penambahan uang yang beredar. Sehingga mengakibatkan turunnya permintaan tenaga kerja.

Tidak signifikansinya inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung ini diduga disebabkan karena faktor pada tahun 2008 pernah terjadi krisis ekonomi yang sepenuhnya belum pulih di tahun 2009 hingga tahun 2017. Karna pada tahun 2010 sejumlah bahan kebutuhan pokok di lampung terjadi kenaikan harga, terutama beras dan sayur-sayuran yang bertahan tinggi.

Kondisi yang berlangsung hampir di sepanjang tahun 2010 itu memicu inflasi tinggi di Kota Bandar Lampung yaitu hingga mencapai 9,95% dtahun 2010. Sedangkan dari tahun tersebut hingga tahun 2017 inflasi di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dan meningkatnya berfluktuatif. Akan tetapi tidak mencapai setinggi di tahun 2010. Sehingga itulah yang menyebabkan tidak adanya pengaruh signifikan secara parsial di Kota Bandar Lampung.

Hal ini serupa dengan penelitian dari I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh tidak

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila semakin tinggi atau rendahnya inflasi, maka tidak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

2) Pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja

Hasil penelitian terkait dengan pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dari tahun 2009 hingga 2017 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi X_2 (PDRB) sebesar $-1,414$ artinya jika PDRB mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan mengalami penurunan sebesar $-1,414$. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang tidak positif antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja. Jika PDRB meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami penurunan.

Adapun secara parsial diketahui untuk variabel PDRB (X_2) yaitu upah minimum bertanda positif sebesar $0,233$, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% PDRB maka penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar $0,233\%$. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Jika semakin bertambahnya PDRB maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja dan sebaliknya.

Berdasarkan analisis diatas terdapat kesesuaian dengan teori yang ada yaitu menurut Slow-Swam, pertumbuhan ekonomi

tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti, pertumbuhan penduduk, tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja yang dapat dilihat dari tingkat PDRB. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor produksinya. Dengan kata lain selanjutnya akan terus berkembang dan semua itu bergantung pada penambahan penduduk, tenaga kerja optimal dan terserapnya tenaga kerja.

Berpengaruhnya PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung ini diduga disebabkan karena letak geografis yang mengantar Kota Bandar Lampung untuk meraih peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi regional IMS-GT maupun menjadi bagian dari koridor kegiatan ekonomi. Dalam konstelasi ruang perekonomian tersebut, Kota Bandar Lampung berpeluang mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Hal ini serupa dengan penelitian dari I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila semakin

tinggi atau rendahnya PDRB, maka memiliki pengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

3) Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja

Hasil penelitian terkait dengan pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dari tahun 2009 hingga 2017 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi X3 (upah minimum) sebesar 0,233 artinya jika upah minimum mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,233. Koefisien bernilai positif antara upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja yang menyatakan bahwa apabila variabel upah minimum semakin tinggi maka penyerapan tenaga kerja pun semakin tinggi pula.

Adapun secara parsial t hitung yakni 3,978 dan nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Sehingga dapat disimpulkan variabel upah minimum secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, maka taraf kepercayaan variabel upah minimum (X3) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel

penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya upah minimum mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan analisis diatas terdapat kesesuaian dengan teori yang ada yaitu Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh diatas upah keseimbangan. Hal tersebut selain akan meningkatkan produktivitas juga akan menimbulkan loyalitas pekerja dapat membuat lebih banyak pekerja yang berkualitas.

Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka waktu tertentu akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja.

Berpengaruhnya upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung ini diduga disebabkan karena pada tahun 2014 muncul permasalahan dalam kebijakan penetapan upah minimum kota (UMK) di Bandar Lampung bahwa penetapan UMK yang diputuskan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, nominal yang diputuskan jauh dari standar yang ditetapkan Kota.

Hal ini menunjukkan dalam proses perumusan penetapan kebijakan UMK tidak menunjukkan sinergisitas antara Kota dan Provinsi. Akan tetapi hal tersebut tidak begitu mempengaruhi pada peningkatan ataupun penurunan penyerapan tenaga kerja selama 9 tahun, yaitu dari tahun 2009 hingga 2017. Karna setelah diteliti bahwa upah minimum termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.

Hal ini serupa dengan penelitian dari Martini yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila upah minimum naik maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan meningkat dan begitupun apabila upah minimum mengalami penurunan maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan turun.

- b. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009-2017

Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung yakni 6,920 dan nilai signifikan sebesar 0,031. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung $6,920 > F \text{ tabel } 5,41$ dan nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima yang artinya variabel independen (inflasi, PDRB dan upah minimum) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (penyerapan tenaga kerja). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen memiliki taraf kepercayaan 95% mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan, dari hasil analisis menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh dari kolom R Square sebesar 0,806. Jadi pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 80,6% sedangkan sisanya 19,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja memiliki dua faktor yaitu lingkungan internal dan eksternal. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Handoko menjelaskan bahawa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat inflasi adalah secara

eksternal. Sedangkan secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah minimum..

c. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan dengan persentase yang sama. Menurut sistem ekonomi Islam inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena: Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang- barang mewah.

Taqiuddin Ahmad ibn al-maqrizi (1364M–1441M) menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu: Natural Inflation dan Human Error Inflation. Inflasi jenis natural inflation ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya permintaan agregatif (AD). Sedangkan human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah-kaidah syariah. Karena Inflasi merupakan suatu gejala buruk yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi bahwa mengakibatkan merugikan masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt yang terdapat dalam Q.S Ar-Ruum (30) Ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah yang menggambarkan ada atau tidaknya pengembangan perekonomian daerah dan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak diketahui oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi

dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Ditinjau dari sejarah pada zaman Rasulullah saw dan empat khalifah pada permulaan islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi yaitu mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya tanpa di biayai oleh Baitul mal. Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin dengan mengeluarkan dana Baitul mal. Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan islam.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu hancurnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Karena sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin.

Seperti dalam firman Allah swt pada Q.S Adz-Dzariyaat (51) Ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah swt menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, shadaqoh, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan.

Disisi lain umat islam dianjurkan untuk bekerja dan upah juga diatur dalam islam bahwa dalam menetapkan upah pekerja harus menerima upah secara adil dan layak. Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad ijarah. Menurut ulama Hanafi Ijarah adalah transaksi dalam suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.

Dalam Al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam Q.S At-Taubah (9) Ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa menurut Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain ayat tersebut diatas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi yang didunia dan imbalan yang berupa pahala diakhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja didunia haruslah adil dan layak, sedangkan imbalan pahala diakhirat merupakan imbalan yang lebih baik diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-Nya.

Pada dasarnya upah yang diberikan oleh pekerja dalam segala hal berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan standar upah minimum provinsi atau kota. Dalam hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018. Upah Minimum Kota Pasal 36 Ayat (1)” Setiap perusahaan wajib melaksanakan upah

minimum kota (UMK) sebagai jaring pengaman dasar pembayaran upah”. lalu dijelaskan pula dalam Pasal 36 Ayat (4) “perusahaan dilarang membuat perjanjian/kesepakatan membayar upah dibawah upah minimum”.

Menurut Ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang salah satunya yaitu prinsip keadilan. Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. Sesuai dengan firman Allah swt Q.S Al-Hadid (57) Ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Prinsip keadilan di sini berkaitan dengan keadilan yang dilakukan oleh pengusaha yaitu adil dalam hal memberikan kompensasi atas apa yang telah dilakukan oleh seorang pekerja, adil dalam memilih tenaga kerja yang cocok untuk bidangnya dan juga keadilan bisa dilihat dari

segi pekerja yaitu pekerja harus melakukan kewajiban seorang pekerja yaitu memenuhi semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja dengan efisien dan jujur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam” maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Variabel inflasi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung yaitu semakin tinggi atau rendahnya inflasi tidak mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009-2017. Sehingga terdapat kesesuaian dengan teori kuantitas. Karena apabila inflasi naik dikarenakan harga meningkat maka dapat mengakibatkan jumlah uang yang beredar menurun, konsumsi masyarakat menurun, produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan semakin sedikit dan menyebabkan pemberhentian tenaga kerja.

Pada variabel PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung yaitu semakin tinggi atau rendahnya PDRB dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Maka terdapat kesesuaian dengan teori Slow-swam. Karena ketika PDRB mengalami kenaikan maka

akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, sehingga akan menyerap tenaga kerja semakin banyak.

Sedangkan variabel upah minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung yaitu semakin tinggi atau rendahnya upah minimum dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Maka terdapat kesesuaian dengan teori upah efisiensi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah harus mempertahankan keadilan dalam menetapkan upah minimum supaya tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Penyerapan tenaga kerja pun ikut berpengaruh sehingga tingkat kemakmuran semakin bertambah dan penyerapan tenaga kerjapun ikut meningkat.

2. Variabel inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2017. Secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 80,6%. Sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Maka terdapat kesesuaian dengan teori Handoko yaitu jika inflasi, PDRB dan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.
3. Perspektif Ekonomi Islam mengenai inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandar Lampung

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena didasarkan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Untuk pemerintah kota maupun daerah diharapkan agar memperbanyak lapangan kerja, meningkatkan laju pertumbuhan PDRB, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung kebijakan dalam mengatur laju inflasi dan penentuan upah minimum kota agar nantinya dapat mempengaruhi dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik.
2. Untuk akademisi dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data yang akan diteliti dan memperbanyak variabel agar hasilnya lebih akurat.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti lebih banyak kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga mampu memberikan hasil penelitian menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011
- Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Al-Syarbini, Muhammad Al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz, (Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani*, 2005
- Andy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011
- Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1997
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Awaluddin, Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16 No. 2 Desember 2017
- Barthos, Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Bellante, Don dan Mark Jackson, *Ekonomi Ketenaga Kerjaan*, Jakarta: FEUI, 1983
- BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*, Katalog: 9302021.1871
- Budiarto, Arif dan Made Heny Urmila Dewi, Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi Di Provinsi Bali, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4, No. 10, Oktober 2015)
- Chapra, Umer, *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Feriyanto, Nur, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013

- Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*, Edisi II, Yogyakarta: BPFE, 1987
- Hasan, Iqbal, *Metode Penelitiannya dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Huda, Nurul, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012
- Indradewa, I Gustika Agung dan Ketut Suardhika Natha, Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4, No. 8, Agustus 2015
- Irawan, Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002
- Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, Pengaruh Investasi Dan Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Kendari, E-ISSN : 2503-1937, *Jurnal Ekonomi*, Vol.1. No. 1, April 2016
- Khawalty, Tajul, *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2000
- Kuncoro, Haryo, Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, 2002
- Kuncoro, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: BPFE, 2011
- Mankiw, N. Gregory, *Makroekonomi*, Jakarta : Erlangga, 2002
- Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006
- Mankiw, N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi IV, Jakarta: Erlangga, 2000
- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993

- Martini, Pengaruh Produk Domestik Bruto sektoral, rata-rata upah minimum provinsi dan investasi baik secara parsial maupun simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006-2013, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol. 5, No. 5, 2016
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan penngembangan*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Muhammad Iswandi, Lalu, *Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*, NTB : IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, 2013
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Nairobi, Hendra dan Muhidin Sirat, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan Makanan di Provinsi Lampung, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.6 No.1, 2017
- Nanga, Muana, *Makroekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nasution, Zulkarnain, Analisis Investasi, PAD dan Jumlah Unit UKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UKM Dikabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ekobisma*. Vol. 5, No. 1, Januari 2018
- Noor, Juliansah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Nurhayati Wasilah, Siti, *Akuntansi Syariah di Indonesia* Jakarta : Salemba Empat, 2015
- Payaman, J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: FE UI, 1985
- Priyatno, Duwi, *Paham Analisis Data Dengan SPSS*, Yogyakarta: Mediakom, 2010
- Raardja, Prathama, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: FEUI, 2008
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I (Economic Doctrines Of Islam)*, Terjemahan Soeroyo Dan Nastangin, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

- Shabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin dan A. Marzuki, Bandung : Al-Ma'arif, 1993
- Sholeh, Maimun, Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 1, April 2007
- Subri, Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharto, *Tenaga Kerja Dan Upah Minimum*, Laporan Hasil Penelitian, Departemen Agama Iain Raden Intan Bandar Lampung Pusat Penelitian, 2003
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2015
- Sujarweni, V. Wiratna, *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015
- Sukirno, Sadono, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Edisi III, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2009
- Sumodiningrat, Gunawan, *Ekonometrika Pengantar*, Yogyakarta : BPFE, 1999
- Suriyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011
- Wasilaputri, Febryana Rizqi, Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pdrb Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol. 5, No. 3, 2016
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Zairah, Nurul, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung

BLANKO KONSULTASI

Nama : Uswatun Hasanah
NPM : 1551010312
Pembimbing I : Ahmad Habibi, S.E., M.E
Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si
Judul : Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung
Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009 - 2017

No.	Tanggal	Permasalahan	Saran Pembimbing	Paraf	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1	07-01-2019	Proposal	Seminar Proposal		
2	22-01-2019	Proposal	Perbaikan Proposal		
3	30-01-2019	Proposal	Acc Proposal dan lanjut BAB I		
4	14-02-2019	Proposal	Acc Proposal dan buat BAB I		
5	21-02-2019	BAB I	Perbaikan BAB I		
6	28-02-2019	BAB I	Acc BAB I		
7	14-03-2019	BAB II	Perbaikan BAB II		
8	15-03-2019	BAB II	Acc BAB II		

9	21-03-2019	BAB III	Acc BAB I s/d BAB III		
10	29-03-2019	BAB I s/d BAB III	Acc BAB I		
11	08-04-2019	BAB I s/d BAB III	Perbaikan BAB II		
12	26-04-2019	BAB I s/d BAB III	Acc BAB I s/d BAB III		
13	07-05-2019	BAB IV s/d BAB V	Perbaikan BAB IV s/d BAB V		
14	13-05-2019	BAB IV s/d BAB V	Perbaikan BAB IV s/d BAB V		
15	24-05-2019	BAB IV s/d BAB V	Perbaikan BAB IV s/d BAB V		
16	27-05-2019	BAB I s/d BAB V	Acc BAB I s/d BAB V		
17	17-06-2019	BAB I s/d BAB V	Acc Munaqosah		

Bandar Lampung, 19 Juni 2019

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003

Femei Purnamasari, S.E., M.Si
NIP. 198405212015032004

Data Mentah
Data-data Inflasi, PDRB dan Upah Minimum
di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017

Tahun	Inflasi	PDRB	Upah Minimum	Penyerapan Tenaga Kerja
	(%)	(%)	(Rp)	(Orang)
2009	4.14	6.01	700000	374261
2010	9.95	6.33	776500	374664
2011	4.24	6.53	865000	370995
2012	4.30	6.65	981000	330999
2013	7.56	6.77	1165000	350233
2014	8.36	7.05	1422500	381304
2015	4.65	6.33	1649500	405605
2016	2.75	6.43	1870000	405605
2017	3.14	6.28	2263390	476469

Data Siap Diolah
Data-data Inflasi, PDRB dan Upah Minimum
di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2017

Tahun	Inflasi	PDRB	Upah Minimum	Penyerapan Tenaga Kerja
	(LN)	(LN)	(LN)	(LN)
2009	1.42	1.79	13.46	12.83
2010	2.30	1.85	13.56	12.83
2011	1.44	1.88	13.67	12.82
2012	1.46	1.89	13.80	12.71
2013	2.02	1.91	13.97	12.77
2014	2.12	1.95	14.17	12.85
2015	1.54	1.85	14.32	12.91
2016	1.01	1.86	14.44	12.91
2017	1.14	1.84	14.63	13.07

Lampiran Outpun Regresi Berganda

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04556477
Most Extreme Differences	Absolute	.172
	Positive	.172
	Negative	-.172
Kolmogorov-Smirnov Z		.516
Asymp. Sig. (2-tailed)		.953

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.144	.991		12.252	.000		
	INFLASI	.056	.063	.242	.900	.409	.539	1.857
	PDRB	-1.414	.544	-.641	-2.601	.048	.640	1.563
	UPAH MINIMUM	.233	.061	.929	3.829	.012	.659	1.517

a. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA

Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00562
Cases < Test Value	4
Cases ≥ Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	5
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Hasil Uji Heteroskedstisitas

Correlations

			INFLASI	PDRB	UPAH MINIMUM	Unstandardized Residual
Spearman's rho	INFLASI	Correlation Coefficient	1.000	.444	-.350	-.100
		Sig. (2-tailed)	.	.232	.356	.798
		N	9	9	9	9
	PDRB	Correlation Coefficient	.444	1.000	.092	-.134
		Sig. (2-tailed)	.232	.	.814	.731
		N	9	9	9	9
	UPAH MINIMUM	Correlation Coefficient	-.350	.092	1.000	-.033
		Sig. (2-tailed)	.356	.814	.	.932
		N	9	9	9	9
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.100	-.134	-.033	1.000
		Sig. (2-tailed)	.798	.731	.932	.
		N	9	9	9	9

Hasil Uji Signifikansi Parsial

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.144	.991		12.252	.000
	INFLASI	.056	.063	.242	.900	.409
	PDRB	-1.414	.544	-.641	-2.601	.048
	UPAH MINIMUM	.233	.061	.929	3.829	.012

a. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA

Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.069	3	.023	6.920	.031 ^a
	Residual	.017	5	.003		
	Total	.086	8			

a. Predictors: (Constant), UPAH MINIMUM, PDRB, INFLASI

b. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.898 ^a	.806	.689	.05764	2.420

a. Predictors: (Constant), UPAH MINIMUM, PDRB, INFLASI

b. Dependent Variable: PENYERAN TENAGA KERJA



Tinik: Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07788	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.02484	22.32712
3	0.76480	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72960	1.47588	2.01505	2.57058	3.39493	4.03214	5.89343
6	0.71758	1.43078	1.94318	2.44801	3.14267	3.70743	5.20783
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.38462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70630	1.39882	1.85055	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81248	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20090	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92983
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97884	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94871	3.73283
16	0.69013	1.33678	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89623	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73408	2.10002	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86393	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.85184	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51785	2.83138	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50490
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48406
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69728	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33282
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32583
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89